



**LITERATURE REVIEW ANALISIS PERMINTAAN KB DI KOTA PADANG (STUDI KASUS RUMAH TANGGA MISKIN)**

***Literature Review Analysis of Family Conditioning Demand in Padang City  
(Case Study of Poor Households)***

**Maryetti<sup>1</sup>, Dessy Abdullah\*<sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup>Universitas Baiturrahmah**

**\*Email: [dessyabdullah@fk.unbrah.ac.id](mailto:dessyabdullah@fk.unbrah.ac.id)**

**Abstract**

*The Family Planning (FP) program aims to control population growth and improve family welfare. Despite the government's subsidized FP services, participation from low-income households in Padang City remains limited. The demand for FP services among low-income households is hindered by various factors, with economic conditions being the primary obstacle. This article employs a literature review approach to analyze the factors influencing the demand for the FP program among low-income households in Padang City. Data were collected from various sources, including journal articles, government reports, and previous research relevant to this topic. The analysis was conducted by organizing the findings into key themes: economic, social, cultural factors, and government policies. Economic factors were identified as the primary barrier to access for low-income households to FP services. Indirect costs such as transportation and limited healthcare facilities were significant obstacles. Additionally, social and cultural factors, including community norms that place value on having many children, further hindered the adoption of the FP program. Although government policies have provided subsidies, they have not been fully effective due to a lack of understanding regarding the variety of contraceptive methods available. The findings suggest that, although various policies have been implemented, the challenges faced by low-income households in Padang City are more complex and require a more holistic approach. To increase participation, more inclusive policies are needed that consider social and cultural factors, along with improving the accessibility of FP services in remote areas.*

**Keywords:** *Family Planning, Low-Income Households, Padang City, Economic Factors, Government Policies, Contraception, Community Participation*

**Abstrak**

*Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun layanan KB bersubsidi dari pemerintah, partisipasi rumah tangga berpenghasilan rendah di Kota Padang masih terbatas. Permintaan layanan KB di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah terhambat oleh berbagai faktor, dengan kondisi ekonomi menjadi kendala utama. Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan program KB di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah di Kota Padang. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, laporan pemerintah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama: faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah. Faktor ekonomi diidentifikasi sebagai hambatan utama akses layanan KB bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Biaya tidak langsung seperti transportasi dan keterbatasan fasilitas kesehatan merupakan hambatan yang signifikan. Selain itu, faktor sosial dan budaya, termasuk norma masyarakat yang menghargai*

*memiliki banyak anak, semakin menghambat adopsi program KB. Meskipun kebijakan pemerintah telah memberikan subsidi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pemahaman mengenai beragamnya metode kontrasepsi yang tersedia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tantangan yang dihadapi rumah tangga berpenghasilan rendah di Kota Padang lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif yang mempertimbangkan faktor sosial dan budaya, serta meningkatkan aksesibilitas layanan KB di daerah terpencil.*

**Kata Kunci:** *Keluarga Berencana, Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah, Kota Padang, Faktor Ekonomi, Kebijakan Pemerintah, Kontrasepsi, Partisipasi Masyarakat*

## PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu inisiatif strategis yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan memperbaiki kualitas hidup keluarga. (Usman et al, 2024) Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga, khususnya yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, agar dapat merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga (BKKBN, 2019). Meskipun program ini sudah disubsidi oleh pemerintah, masih terdapat kendala yang menghambat partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan aksesibilitas Henni Febriawati et al, 2024).

Di Kota Padang, meskipun telah ada berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya program KB, tingkat partisipasi rumah tangga miskin dalam menggunakan layanan KB masih terbilang rendah. Faktor ekonomi sering kali menjadi penghalang utama, di mana banyak keluarga dengan pendapatan rendah merasa kesulitan untuk mengakses layanan KB meskipun biaya layanan telah disubsidi pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2020). Selain itu, ada pula faktor budaya, pengetahuan yang terbatas mengenai metode kontrasepsi, serta kurangnya informasi mengenai manfaat jangka panjang program KB yang turut mempengaruhi keputusan mereka dalam mengikuti program ini (Aminah, 2018).

Permintaan KB di kalangan rumah tangga miskin di Kota Padang perlu ditelaah lebih mendalam untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan program KB, dengan fokus pada hambatan ekonomi dan sosial yang ada di kalangan rumah tangga miskin di wilayah tersebut. (Andraresta, 2024) Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB di Kota Padang (BKKBN, 2021).

## METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kajian literatur atau tinjauan pustaka. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan program Keluarga Berencana (KB) di kalangan rumah tangga miskin di Kota Padang, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data dalam kajian ini melibatkan pencarian dan seleksi sumber-sumber primer dan sekunder

yang tersedia di berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Kesehatan Kota Padang.

Sumber-sumber yang dipilih untuk kajian ini meliputi artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan program KB di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Artikel-artikel yang digunakan sebagai referensi dalam kajian ini mencakup topik-topik yang berkaitan dengan: 1) Penelitian yang menyoroti hubungan antara faktor ekonomi rumah tangga miskin dan rendahnya partisipasi mereka dalam program KB (Henni Febriawati et al, 2024; Aminah, 2018; Bell et al, 2024); 2) Kajian yang mengidentifikasi pengaruh norma sosial dan budaya lokal terhadap penerimaan program KB di masyarakat, khususnya di kalangan keluarga berpendapatan rendah (BKKBN, 2019; Dinas Kesehatan Kota Padang, 2020); 3) Literatur yang mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap peningkatan aksesibilitas dan partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB di tingkat lokal dan nasional (BKKBN, 2021). (Homayounzadeh dan Azin, 2024).

Metode seleksi artikel dilakukan dengan kriteria inklusi berupa artikel yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir, relevansi topik dengan penelitian ini, serta kualitas metodologi yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut. Artikel yang tidak relevan dengan fokus studi ini atau yang tidak memiliki data empiris yang cukup tidak dimasukkan dalam kajian. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir dan mengelompokkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu ke dalam tema-tema utama, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menilai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi keputusan rumah tangga miskin dalam mengakses layanan KB, serta dampaknya terhadap tingkat partisipasi dalam program tersebut.

Sumber pencarian artikel dilakukan melalui basis data akademik utama seperti Google Scholar, JSTOR, PubMed, serta laporan resmi dari BKKBN dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Fokus utama adalah artikel yang berhubungan langsung dengan permintaan KB, rumah tangga miskin, dan Kota Padang. Kriteria inklusi, yaitu: 1) Artikel yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan keaktualan data; 2) Artikel yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu mengenai program KB, faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah dalam konteks rumah tangga miskin; 3) Artikel yang memiliki metodologi yang jelas dan valid, baik menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria eksklusi, yaitu: 1) Artikel yang tidak relevan dengan topik atau tidak membahas masalah terkait rumah tangga miskin dan program KB; 2) Artikel yang tidak memiliki data empiris yang cukup atau hanya berupa tinjauan teoritis tanpa hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel yang terpilih akan diklasifikasikan berdasarkan tema utama yang relevan dengan fokus studi. Proses pengorganisasian dilakukan dengan langkah-langkah: 1) Faktor Ekonomi: Artikel yang membahas hambatan ekonomi, aksesibilitas layanan, serta biaya yang mempengaruhi keputusan rumah tangga miskin dalam mengikuti program KB; 2) Faktor Sosial dan Budaya: Artikel yang mengkaji norma sosial, tradisi lokal, dan persepsi masyarakat terhadap program KB yang memengaruhi tingkat partisipasi; 3) Kebijakan Pemerintah: Artikel yang menilai efektivitas kebijakan pemerintah terkait subsidi atau program KB yang

ditujukan untuk rumah tangga miskin di tingkat lokal atau nasional.

Setelah artikel terkumpul, proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan dari setiap artikel ke dalam tema-tema utama. Tema 1: Faktor Ekonomi: Pembahasan tentang bagaimana faktor ekonomi memengaruhi rendahnya permintaan program KB di kalangan rumah tangga miskin. Tema 2: Faktor Sosial dan Budaya: Identifikasi dampak norma sosial dan budaya terhadap penerimaan rumah tangga miskin terhadap program KB. Tema 3: Kebijakan Pemerintah: Evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menyediakan layanan KB bagi rumah tangga miskin, termasuk kebijakan subsidi dan jangkauan layanan.

Temuan dari berbagai artikel yang relevan akan disintesis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah dalam memengaruhi permintaan KB di kalangan rumah tangga miskin di Kota Padang. Hasil analisis tematik akan disajikan dalam bentuk naratif yang menghubungkan setiap tema dengan teori atau model yang relevan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari literatur yang ditinjau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan program Keluarga Berencana (KB) di kalangan rumah tangga miskin di Kota Padang. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama: faktor ekonomi, sosial dan budaya, serta kebijakan pemerintah. Setiap tema memberikan wawasan yang berbeda mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh rumah tangga miskin dalam mengakses dan memanfaatkan layanan KB yang disediakan pemerintah.

### **Faktor Ekonomi**

Salah satu hambatan terbesar dalam partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB adalah keterbatasan ekonomi. Meskipun biaya layanan KB sebagian besar telah disubsidi oleh pemerintah, banyak rumah tangga miskin yang masih merasa kesulitan untuk mengaksesnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biaya tersembunyi, seperti biaya transportasi untuk mengakses layanan KB atau biaya terkait kesehatan, sering kali menjadi penghalang utama (Henni Febriawati et al, 2024; Aminah, 2018).

Selain itu, keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat banyak keluarga lebih fokus pada kebutuhan dasar seperti pangan dan perumahan, sehingga mereka kurang memprioritaskan penggunaan layanan KB. Sebuah studi oleh Dinas Kesehatan Kota Padang (2020) juga mencatat bahwa rumah tangga miskin di kota ini lebih cenderung menghindari pengeluaran tambahan untuk kesehatan, termasuk kontrasepsi, karena tekanan finansial yang mereka hadapi.

### **Faktor Sosial dan Budaya**

Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam keputusan rumah tangga miskin untuk mengikuti program KB. Dalam banyak kasus, norma sosial yang berlaku di masyarakat lokal menghambat adopsi kontrasepsi. Penelitian yang dilakukan oleh BKKBN (2019) mengungkapkan bahwa dalam beberapa komunitas di Kota Padang, ada pandangan bahwa memiliki banyak anak adalah simbol status sosial dan prestise. Hal ini menyebabkan keluarga, terutama yang berada di lapisan bawah, enggan untuk mengikuti program KB meskipun mereka berada dalam kondisi ekonomi yang tidak

stabil.

Norma-norma ini sering diperkuat oleh keyakinan budaya dan agama yang menganggap bahwa jumlah anak yang banyak adalah berkat atau kewajiban keluarga. Aminah (2018) menemukan bahwa rumah tangga miskin yang terpapar pengaruh budaya lokal cenderung enggan menggunakan kontrasepsi, meskipun mereka tahu adanya layanan subsidi dari pemerintah.

### **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB. Pemerintah Indonesia melalui BKKBN telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses layanan KB bagi masyarakat berpendapatan rendah, seperti program subsidi kontrasepsi dan penyuluhan di tingkat desa. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas.

Menurut laporan Dinas Kesehatan Kota Padang (2020), meskipun banyak rumah tangga miskin yang telah diberi informasi mengenai program KB, mereka sering kali tidak dapat mengakses layanan tersebut karena kendala jarak dan kurangnya fasilitas kesehatan yang terjangkau di daerah terpencil. Selain itu, BKKBN (2021) juga mencatat bahwa meskipun kebijakan subsidi KB telah diterapkan, banyak rumah tangga miskin yang belum memanfaatkan layanan ini secara maksimal karena rendahnya tingkat pengetahuan tentang metode kontrasepsi yang tersedia.

### **Integrasi Faktor Ekonomi, Sosial, dan Kebijakan**

Sebagian besar penelitian yang dilakukan mengenai permintaan KB di kalangan rumah tangga miskin menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Faktor ekonomi yang membatasi kemampuan keluarga untuk mengakses layanan KB berinteraksi erat dengan faktor sosial yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap pentingnya KB. Selain itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan akses ke layanan KB harus dipertimbangkan dengan konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat setempat.

Studi oleh Henni Febriawati et al, (2024) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan subsidi memberikan dampak positif, kebijakan tersebut perlu disertai dengan pendekatan yang lebih menyeluruh yang mempertimbangkan latar belakang sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang program KB yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada perubahan persepsi sosial dan budaya terhadap keluarga berencana.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana (KB) di Kota Padang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor ekonomi, seperti keterbatasan finansial dan biaya tidak langsung yang terkait dengan akses layanan KB, menjadi salah satu penghalang utama. Meskipun layanan KB telah disubsidi oleh pemerintah, kesulitan dalam mengakses layanan akibat jarak dan biaya transportasi tetap menjadi hambatan signifikan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program KB. Dalam beberapa komunitas, norma sosial yang menilai banyaknya anak sebagai simbol status dan prestise menghalangi rumah tangga miskin untuk

berpartisipasi dalam program KB, meskipun mereka sadar akan manfaat program tersebut. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah akses program KB bagi rumah tangga miskin, seperti subsidi kontrasepsi dan penyuluhan, menunjukkan dampak positif. Namun, kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat lokal, serta peningkatan pemahaman mengenai keberagaman metode kontrasepsi yang tersedia. Secara keseluruhan, faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap rendahnya permintaan dan partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB di Kota Padang.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB di Kota Padang antara lain: 1) Peningkatan Aksesibilitas dan Dukungan Ekonomi: Pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan KB ke daerah-daerah terpencil dan meningkatkan subsidi untuk keluarga miskin. Selain itu, menyediakan fasilitas transportasi atau subsidi biaya transportasi bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan dapat mengurangi hambatan akses; 2) Pendekatan Sosial dan Budaya: Program edukasi yang lebih intensif mengenai manfaat KB, yang disesuaikan dengan norma dan nilai lokal, perlu digalakkan. Pemberdayaan masyarakat melalui kader-kader KB lokal yang dapat membantu mengubah pandangan sosial terhadap program KB sangat penting untuk meningkatkan partisipasi rumah tangga miskin; 3) Perbaikan Kebijakan dan Penyuluhan: Kebijakan pemerintah yang ada perlu lebih disosialisasikan agar rumah tangga miskin memahami adanya layanan KB yang tersedia bagi mereka, serta pentingnya keberagaman metode kontrasepsi. Penyuluhan yang berbasis pada pendekatan yang lebih inklusif dan ramah budaya akan membantu masyarakat lebih terbuka dalam mengakses layanan ini; 4) Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi permintaan KB di kalangan rumah tangga miskin, seperti faktor psikologis, pengalaman keluarga sebelumnya dengan program KB, dan pengaruh lingkungan sosial yang lebih luas. Penelitian tersebut dapat memberikan wawasan lebih dalam yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan partisipasi rumah tangga miskin dalam program KB di Kota Padang dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel ini, terutama kepada para peneliti dan instansi terkait yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat berguna. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, teman, dan kolega atas motivasi dan dukungan moralnya. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan tentang program Keluarga Berencana di kalangan rumah tangga miskin di Kota Padang.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminah, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan dalam Program Keluarga Berencana di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 112-120.
- BKKBN. (2019). *Laporan Tahunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. (2021). *Program Keluarga Berencana: Analisis Dampak Kebijakan Subsidi di Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Dinas Kesehatan Kota Padang. (2020). *Laporan Program Keluarga Berencana Kota Padang 2020*. Padang: Dinas Kesehatan Kota Padang.
- Henni Febriawati, S. K. M., Pratiwi, B. A., Wulan Angraini, S. K. M., Riska Yanuarti, S. K. M., Oktarianita, S., Km, M., & Iis Suryani, S. K. M. (2024). *Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Usman, Faiza Doho Mahdi, Nenpanmun Temwa Molwus, Muazu Abubakar, Yahaya Bako Sade, Hussaini Abdulrahman Dogo. (2024). Assessment of women perception and attitude towards contraception in Gadaka Town, Fika Local Government Area, Yobe State of Nigeria. *International Journal of Science and Research Archive*.
- Silvia Vaula Andraresta. (2024). Factors related to unmet needs for family planning amongst reproductive-age women in Indonesia: A literature review. *World Journal of Advanced Research and Reviews*.
- Elaheh Homayounzadeh, Seyed Mohammad Azin. (2024). A Criticism of the Distribution of Contraceptives According to the Youthful Population and Protection of the Family Law. *Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine*.
- Moses Festo Towongo, Matlhogonolo Kelepile. (2024). Prevalence, distribution and factors associated with modern contraceptive use among women of reproductive age in Uganda: evidence from UDHS 2016. *Contraception and Reproductive Medicine*.
- Suzanne Bell, Susannah E. Gibbs, Abigail Winskell, Xaviera Villarino, Halle Gill, Kristen Little. (2024). Acceptability of an on-demand pericoital oral contraceptive pill: a systematic scoping review. *Reproductive Health*.

